

KENDALA PERAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP RESIKO BENCANA GEMPA BUMI

Septin^{1(a)}, Zikri Alhadi^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}septin2601@email.com, ^{b)}zikrialhadi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

06-11-2023

Diterbitkan Online:

01-06-2024

Kata Kunci:

Kendala, Hambatan,
Kesiapsiagaan Bencana

Keywords:

Constraints, Barriers,
Disaster Preparedness

Corresponding Author:

septin2601@email.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.154>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana gempa bumi. Penelitian ini adalah studi kualitatif yang mengaplikasikan metode deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa terdapat dua kendala yang menghambat peran Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana gempa bumi, yaitu kendala internal dan eksternal.

ABSTRACT

This research aims to identify the factors that become obstacles in the implementation of the role of the Gunungsitoli City Government in improving community preparedness for earthquake disaster risk. This research is a qualitative study that applies the descriptive method. The research findings indicate that there are two obstacles that hinder the role of Gunungsitoli City in improving community preparedness for earthquake disaster risk, namely internal and external obstacles.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah rendahnya kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli terkait dengan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi. Banyak dari masyarakat yang mengabaikan mengenai pentingnya hal ini. Masyarakat beranggapan bahwa pengetahuan mengenai kesiapsiagaan terkait bencana alam hanya penting dan dibutuhkan ketika bencana alam sedang terjadi sedangkan ketika keadaan sedang baik-baik saja maka tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Tentunya ini menjadi tugas penting yang harus diselesaikan agar kedepannya dampak buruk yang dihasilkan dari bencana alam dapat diminimalisir dengan baik.

Penanggulangan bencana alam merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan di daerah. Untuk memprediksi kemungkinan bencana dan menghindari kerugian materi, antisipasi perlu dilakukan secara awal oleh pemerintah dan komunitas lokal, karena selain peran pemerintah, komunitas atau masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi untuk menciptakan rasa aman meskipun daerah tersebut tergolong rawan bencana alam (Awalia, Vidia Reski, dkk.: 2015).

Pemerintah harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola situasi di wilayah yang berisiko bencana. Kemampuan ini mencakup perencanaan dan persiapan untuk merespons bencana alam, mengkoordinasikan

bantuan, melakukan upaya rekonstruksi, serta menangani isu-isu populasi. Pemerintah dapat memastikan kerja sama yang efektif dalam pengembangan program mitigasi bencana. Sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan kemanusiaan, pemerintah suatu negara memiliki peran utama dalam menangani bencana alam.

Fokus pada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana menjadi penting karena beberapa faktor, yakni: 1) Penanggulangan bencana merupakan tugas yang diemban oleh pemerintah daerah, 2) Pemerintah daerah memiliki peran yang aktif dalam upaya penanggulangan bencana, 3) Otoritas besar diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, 4) Kebijakan penanggulangan bencana membutuhkan pendekatan yang berfokus pada lokalisasi. Alasan-alasan ini menjadi dasar pentingnya penanganan bencana di tingkat lokal, yang sangat memengaruhi pelaksanaan upaya penanggulangan bencana (Abdul Latief: 2015).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan hak-hak dalam hal mitigasi bencana, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang mencakup: 1) Memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat dan individu yang terdampak oleh bencana alam sesuai dengan standar minimal layanan yang ditetapkan., 2) Melindungi masyarakat dari akibat bencana alam., 3) Mengurangi risiko bencana yang terkait dengan sumber daya alam dan mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam program pembangunan, 4) Pengalokasian sumber daya yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan penanggulangan bencana.

Wilayah Daerah dan Daerah Terdampak Bencana adalah langkah untuk mengevaluasi kebijakan umum, praktik, dan profesionalisme dalam manajemen respons krisis dari sudut pandang pemerintah daerah. Upaya ini fokus pada pemerintah daerah sebagai langkah awal dalam fase bencana. Respons penting untuk meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan kapasitas respons masyarakat. Tindakan tanggap bencana regional bergantung pada otoritas lokal.

Dengan merujuk pada Keputusan Nomor 47 Tahun 2008 yang mengenai Pendirian Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kota Gunungsitoli menyadari

pentingnya penanggulangan bencana untuk mencegah kerugian besar bagi kota madya, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli, memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis, administratif, dan operasional kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dalam berbagai aspek, seperti pencegahan, kesiapsiagaan, respons darurat, manajemen logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif berbasis deskripsi. Penelitian dilaksanakan di berbagai lingkungan di kota Gunungsitoli. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik purposive sampling. Informan penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD dan staff BPBD. Peneliti memiliki dua jenis sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data ini diperoleh melalui proses wawancara, analisis dokumen, serta observasi. Sedangkan triangulasi sumber digunakan untuk analisis dan validasi data, serta untuk menganalisis menggunakan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD bertugas untuk meminimalkan risiko dan kerugian akibat bencana serta melindungi masyarakat dan aset kritis dari dampak bencana. Untuk itu BPBD memiliki peran dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana terutama gempa bumi. Namun dalam menjalankan perannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli menghadapi tantangan yang mencakup masalah internal dan faktor-faktor eksternal.

Kendala Internal

Apabila diperhatikan dari hasil penelitian, terungkap bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko gempa bumi terdapat kendala internal yang dihadapi BPBD Kota Gunungsitoli yaitu keterbatasan sumber daya baik dari sumber daya manusia ataupun keuangan. Yang dimana dana yang diterima

BPBD Kota Gunungsitoli dari pemerintah daerah sangatlah terbatas untuk menjalankan program BPBD. Dikarenakan selain menggunakan dana tersebut untuk program kebencanaan, BPBD Kota Gunungsitoli juga menggunakan sebagian dana untuk menggaji staff BPBD. Selain kekurangan dana, BPBD Kota Gunungsitoli juga mengalami kendala internal lain yaitu, keterbatasan sumber daya pegawai yang paham mengenai kebencanaan. Pegawai BPBD yang memiliki pengetahuan mengenai kebencanaan berjumlah sedikit, selain itu mutasi pegawai juga menjadi permasalahan yang sering dihadapi BPBD Kota Gunungsitoli sehingga BPBD Kota Gunungsitoli cukup kesulitan dalam merencanakan dan menjalankan program kebencanaan secara maksimal.

Ini sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh Hansen dan Mowen dalam penelitian yang dilakukan oleh Selvian dan Setya (2016:23), di mana kendala internal merujuk pada halangan yang bersumber dari dalam organisasi sendiri yang menghambat faktor-faktor lainnya.

Kendala Eksternal

Jika dilihat dari hasil temuan penelitian terungkap bahwa dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Resiko Bencana Gempa Bumi terdapat kendala eksternal yang dihadapi BPBD Kota Gunungsitoli yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan ancaman bencana yang terjadi wilayah tempat tinggal mereka walaupun sebelumnya daerah tersebut sering terkena bencana dan sudah terpasang rambu-rambu bencana. Hal ini masih abaikan oleh masyarakat sekitar dikarenakan mereka beranggapan bahwa selagi bencana belum terjadi bencana maka mereka tidak perlu khawatir.

Dalam teori yang diajukan oleh Hansen dan Mowen dalam kajian yang dilakukan oleh Selviana dan Setya (2016:23), kendala eksternal didefinisikan sebagai halangan yang berasal dari sumber-sumber di luar organisasi yang dapat menghambat faktor-faktor internal organisasi tersebut. Kendala di luar organisasi juga bisa membuat pelaksanaan tugas organisasi menjadi lebih sulit, sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Peran Pemerintah Kota Gunungsitoli Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat

Kendala Peran Pemerintah Kota Gunungsitoli Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Resiko Bencana Gempa Bumi antara lain: a) Kendala internal yang dihadapi BPBD Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana yaitu keterbatasan sumber daya baik dari sumber daya manusia ataupun keuangan. Selain itu mutasi pegawai juga menjadi permasalahan yang sering dihadapi BPBD Kota Gunungsitoli. b) Kendala Eksternal yang dihadapi BPBD Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan terhadap risiko bencana alam di wilayah tempat tinggal mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yaitu, BPBD Kota Gunungsitoli perlu terus meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan komunikasi dengan pihak terkait untuk lebih efisien dalam memfasilitasi kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Selain itu, perlu memperluas upaya sosialisasi kebencanaan dan pelatihan kepada masyarakat serta memastikan bahwa peralatan teknis dan keterampilan yang diperlukan terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan dalam penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Awalia, Vidia Reski, dkk. 2015. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 5 No. 2 Oktober 2015 (Hal. 202).
- Selviana Putri Larasati, Setya Haksana. 2016. Penerapan Theory Of Constraint Pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*. Vol. 4 No. 2
- Suryadi, Novan. 2020. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 2, 2020. Hal. 428.

Latief, Abdul. 2015. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin .

gunungsitolikota.go.id (2022, 25 September). Rencana Strategis (*RENSTRA*) *BPBD Kota Gunungsitoli* tahun 2016-2021. dari https://gunungsitolikota.go.id/wp-content/uploads/_docs/akip/bpbd/bpbd-lkj-2018.pdf